

Analisis kebijakan pengenaan pajak atas bahan bakar minyak bersubsidi minyak solar = Analysis of tax policy on subsidized fuel diesel oil

Andi Mohammad Iqbal, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20415743&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas kebijakan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar di Indonesia. Saat ini, BBM bersubsidi dikenakan pajak-pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut pemerintah pusat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipungut pemerintah daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian berkesimpulan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dikarenakan alasan untuk penerimaan pusat dan daerah. Selain itu, pengenaan pajak juga untuk mengontrol pola konsumsi BBM bersubsidi dimasyarakat. Terkait pengenaan 2 jenis pajak atas produk yang sama, pengenaan PPN dan PBBKB merupakan pajak berganda dan membuat pengenaan pajak tersebut menjadikan tidak netral terhadap perekonomian mengingat BBM bersubsidi merupakan barang kebutuhan vital bagi masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN agar harga jual eceran BBM bersubsidi minyak solar lebih stabil dan kebijakan tegas terkait upaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi khususnya minyak solar hanya oleh mereka yang berhak disubsidi.

<hr>

The purpose of this research is to analyze the tax policy on subsidized fuel of diesel oil in Indonesia. Currently, subsidized fuel in Indonesia are taxed Value Added Tax (VAT) by central government and Vehicle Fuel Tax by local government. This research is using post positivist approach with qualitative method of research. The results of this research conclude tax on subsidized fuel oil are taken by government with the purpose of revenue productivity for both central government and local government. Besides, to control the consumption of subsidized fuel in the public. By taxing 2 kind of taxes on subsidized fuel diesel oil incurring the double taxation and resulting those taxes are not neutral for economic since the subsidized fuel are the vital public needs. Government should evaluate the tax policy on subsidized fuel diesel oil by exempting the VAT on subsidized fuel in order to maintain the economic stability and make a strict policy on controlling the consumption on subsidized fuel diesel oil only for them who reserve to get the subsidy.